

ABSTRAK

Dalam rangka mewujudkan Penyelenggaraan Negara yang mampu menjalankan fungsi dan tugasnya secara sungguh-sungguh dan penuh tanggungjawab, perlu diletakkan asas-asas penyelenggaraan Negara yang baik. Praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme yang dilakukan antar-Penyelenggara Negara dan juga antara Penyelenggaraan Negara dan pihak lain, dapat merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara serta membahayakan eksistensi negara, karena itu diperlukan landasan hukum dan juga penegakan hukum yang setegak-tegaknya.

Penelitian ini membahas tentang penerapan hukum terhadap PNS yang melakukan tindak pidana pelanggaran dalam jabatan yang diimplementasikan berdasarkan surat keputusan pemberhentian dengan tidak hormat terhadap PNS yang melakukan tindak pidana dalam jabatan.

Hasil pembahasan penelitian ini adalah, bahwa pemberhentian dengan tidak hormat terhadap PNS dilakukan dengan alasan PNS tersebut telah melanggar sumpah/janji. Penerapan hukum yang dilakukan Walikota Surabaya terhadap para PNS tersebut dirasa benar, karena untuk mewujudkan pemerintahan yang baik harus didukung dengan pegawai atau pejabat yang bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme. Wali kota Surabaya dalam memberikan Surat Keputusan yang memberhentikan dengan tidak hormat PNS pada Dinas Perhubungan Kota Surabaya tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal 23 ayat (5) UU No. 43 Tahun 1999 dan Pasal 6 PP No. 30 Tahun 1980 jo Pasal 7 PP No. 53 Tahun 2010. Surat keputusan Walikota Surabaya tersebut tidak dapat dibatalkan meskipun dengan alasan masa hukuman kurang dari 4 tahun. Surat Keputusan Walikota Surabaya tersebut sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan bahkan sejalan pula dengan instruksi Surat Kepala BKN Nomor K.26-30/V.326-2/99 Tanggal 20 November 2012.

Kata kunci: Pegawai Negeri Sipil, pemerintahan yang baik, korupsi, pemberhentian dengan tidak hormat

ABSTRACT

In order to establish a State Implementation able to carry out its functions and duties seriously and responsibly, to put the basics of a good governance. Corruption, collusion, and nepotism between the state official and others, can damage the joints of the community, nation, and state and endanger the existence of the state, because it required a legal and appropriate law enforcement.

This study discusses the application of the law on civil servants who commit criminal offenses in positions that are implemented by virtue of a decision of dismissal with respect to the civil servants who commit criminal acts in office.

The results of this research study is, the dishonorable discharge of the civil servants is done by the ones had violated the oath / affirmation. The application of the law made the mayor of Surabaya against the civil servant is right, because to achieve good governance must be supported by an employee or officer of the free of collusion, corruption and nepotism. Mayor of the city of Surabaya in giving a decree to dismiss with respect to the civil servants of the Surabaya City Department of Transportation based on the provisions of Article 23 paragraph (5) of Law No. 43 of 1999 and Article 6 of Regulation No. 30 In 1980, in conjunction with Article 7 PP 53 in 2010. The mayor of Surabaya decree can not be canceled even though the reason for a sentence of less than four years. Decree of the Surabaya mayor is in conformity with the legislation even in line with the instruction letter head of the national civil service Number K.26-30 / V.326-2 / 99 On November 20 of 2012.

Keywords: Civil Servant, good governance, corruption, dishonorable discharge